

ANALISIS PENTINGNYA INVESTASI PENDIDIKAN

Ersam Mahendrawan¹, Rian Sri Rahayu²

^{1,2}Universitas Pamulang

dosen01329@unpam.ac.id¹, dosen00969@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan majunya kesempatan memperoleh pendidikan yang luas dan berkualitas bagi masyarakatnya. Dengan kualitas diri yang diperoleh lewat pendidikan, diharapkan akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul sehingga menjadi modal positif dalam menghadapi kehidupan yang kompetitif dan penuh tantangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis seberapa pentingnya investasi pendidikan di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dapat digunakan seoptimal mungkin. Metode penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode studi literasi dari beberapa media massa yang kredibel yang didukung oleh sumber-sumber lain yang relevan. Kesimpulan dari artikel ini adalah diperlukannya strategi untuk mengoptimalkan anggaran yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan tiga syarat pencapaian terhadap anggaran pendidikan, yaitu: (1) memastikan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun pada saat anggaran pendidikan 20 persen terpenuhi; (2) harus ada jaminan bagi tunjangan guru dan peningkatan SDM; (3) harus ada jaminan perbaikan sarana pendidikan. Selain itu investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi.

Kata Kunci: Investasi; Pendidikan

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan majunya kesempatan memperoleh pendidikan yang luas dan berkualitas bagi masyarakatnya. Dengan kualitas diri yang diperoleh lewat pendidikan, diharapkan akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul sehingga menjadi modal positif dalam menghadapi kehidupan yang kompetitif dan penuh tantangan. Untuk melahirkan manusia yang unggul itu, diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pendidikan sebagai investasi masa depan. Sebagai investasi masa depan bangsa, maka pendidikan harus dilakukan melalui program berkelanjutan dan sistemik yang

dikemas dalam berbagai program kebijakan.

Bentuk perhatian pemerintah dalam berinvestasi di bidang pendidikan, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh ulasan www.republika.co.id pada tanggal 16 November 2017 ketika Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya bidang investasi pendidikan bagi generasi muda untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa angka demografi Indonesia yang didominasi oleh masyarakat muda, akan menghasilkan 20 persen lebih banyak pekerja dalam 20 tahun ke depan yang mana pada saat ini, baik Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, serta seluruh jajaran pemerintah Indonesia tengah fokus untuk berinvestasi dalam modal manusia atau

'*human capital*', yang menjadikan pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang penting.

Menurut Sri Mulyani, konstitusi Indonesia telah mewajibkan pemerintah untuk mengeluarkan setidaknya 20 persen dari anggaran dan pengeluaran untuk pendidikan karena Pendidikan telah dianggap sebagai suatu elemen yang penting dalam membangun negara. Angka anggaran dapat mencapai Rp 440 triliun yang didistribusikan secara nasional dan juga lokal dan telah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kota dan provinsi.

Penalaran Tentang Pentingnya Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, Indonesia termasuk negara yang beruntung karena memiliki masyarakat berusia muda atau generasi muda (pemuda) dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti telah dipaparkan, bahwa jika dibandingkan negara Cina dan Jepang, Indonesia bisa dibilang tidak kekurangan atau memiliki cukup tenaga muda yang potensial dan dapat dikatakan sebagai aset bangsa yang tidak boleh disia-siakan karena dapat memberikan peranan yang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara sehingga negara semakin maju dan semakin lebih baik.

Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Karena semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan penanganan tepat khususnya pemberian pendidikan yang tepat guna menjadikan para pemuda yang potensial ini menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sebagai wujud investasi pendidikan.

Tujuan Penulisan Artikel

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dapat digunakan seoptimal mungkin.

Tinjauan Teoritik

Berdasarkan uraian pada pendahuluan mengenai investasi pendidikan, terdapat beberapa teori dan konsep yang dikemukakan oleh para ahli. Cohn (1979) mengemukakan bahwa individu yang mengikuti pendidikan akan memperoleh banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan peningkatan pendapatan di dalam kehidupannya, serta masyarakat memperoleh manfaat dari produktivitas tenaga kerja terdidik.

Becker (1993) juga mengemukakan bahwa investasi di bidang pendidikan mampu memberikan dampak manfaat (*benefit*) lebih besar dibandingkan dengan investasi di bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Karena manfaat yang diperoleh individu dan masyarakat tidak hanya berbentuk materi (penghasilan), tetapi juga berbentuk non materi (seperti perilaku produktif, perilaku sehat, perilaku berbudaya).

Ahmed (1975) menyatakan bahwa dalam pengelolaan investasi pendidikan, hubungan antara proses pendidikan dengan manfaat pendidikan adalah bersifat tidak langsung. Manfaat pendidikan (seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan perubahan sikap) akan diperoleh jika output pendidikan digunakan secara efektif di masyarakat.

Anggaran 20% dari APBD atau APBN yang telah disetujui oleh MPR mengindikasikan bahwa saat ini, Indonesia mulai melirik investasi jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Fungsi Teknis Ekonomis

Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praktik manajemen pendidikan modern, salah satu fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat

membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Di Amerika Serikat (1992) seseorang yang berpendidikan doktor penghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33 juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpenghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang sama struktur ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya rata-rata, antara pedesaan dan perkotaan, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD hanya 1,1 juta rupiah.

Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan

pendidikan dibawahnya. (McMahon and Geske, 1982: 121)

Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

2. Nilai Balik Pendidikan

Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. (Ace Suryadi, 1999: 247)

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Nilai balik sosial di Asia menunjukkan pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan

demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Pada tahun 1995/1996 misalnya, alokasi biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk Sekolah Dasar Negeri per siswa paling kecil yaitu rata-rata hanya sekira 18.000 rupiah per bulan, sementara itu biaya pendidikan per siswa di Perguruan Tinggi Negeri mendapat alokasi sebesar 66.000 rupiah per bulan. Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro suatu ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi negeri 25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar vs tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa (miskin vs kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan kriteria *equity* dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan Unesco.

3. Fungsi Non Ekonomi

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu

fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. (Cheng, 1996: 7)

Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga negara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetik serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi

budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.

Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.

Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi/uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri.

Sintesis Hasil Pembahasan Konsep/Teori

Berdasarkan konsep dan teori yang telah diuraikan konsep/teori yang relevan, maka dapat disimpulkan bahwa investasi pendidikan merupakan investasi yang memberikan dampak manfaat materi dan non materi yang bersifat tidak langsung. Investasi jangka panjang memiliki setidaknya 3 fungsi yang dapat diperoleh, yaitu: Fungsi Teknis Ekonomis, Nilai balik pendidikan, dan Fungsi Non Ekonomi.

Pembahasan Kajian Masalah Analisis Masalah

Berdasarkan artikel yang terangkum pada latar belakang masalah, maka dapat dilihat sebuah permasalahan

tentang bagaimana anggaran untuk pendidikan yang diberikan sekitar 20% atau dengan kisaran biaya sekitar Rp 440 triliun dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Hal ini penting diketahui karena diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan dalam hal ini investasi pendidikan, merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Menurut UU No 20/2003, pasal 49 ayat 1, disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Berdasar data Kemendagri, terdapat sekitar lima provinsi yang anggaran pendidikannya sudah 20 persen. Kelima provinsi itu adalah DKI Jakarta sebesar 22,51 persen, Lampung 21,76 persen, Riau 20,21 persen, Kalimantan Tengah 20 persen, dan Jawa Tengah 21,14 persen. Sedangkan alokasi rendah terdapat di Provinsi Maluku Utara yang hanya 4,7 persen. Untuk wilayah Jawa Timur juga belum mampu mencapai 20 persen yaitu hanya mencapai 12 persen.

Jika sudah terpenuhi 20 persen, maka pemda harus memanfaatkan anggaran dengan benar. Anggaran pendidikan tersebut harus diikuti oleh tiga pencapaian. Ketiga syarat tersebut yaitu: (1) Memastikan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun pada saat anggaran pendidikan 20 persen terpenuhi; (2) Harus ada jaminan bagi tunjangan guru dan peningkatan SDM; (3) Harus ada jaminan perbaikan sarana pendidikan. Dalam hal ini diperlukan pelatihan kepala sekolah dan guru yang diselenggarakan dinas-dinas pendidikan di setiap daerah agar tercipta standarisasi tenaga pengajar baik di desa maupun di kota. Harapannya tentu adalah penggunaan anggaran tersebut dapat tepat sasaran dan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian apa yang ingin dicapai pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi rakyat secara merata akan tercapai dan terlaksana dengan baik. Namun

pada pelaksanaannya tentu mendapatkan banyak permasalahan, seperti rendahnya honor guru honorer di banyak sekolah di Indonesia, tentu menimbulkan dampak pada kesejahteraan guru. Jika dilihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, hal ini cukup tidak seimbang. Padahal peran mereka untuk menyukseskan pendidikan nasional tidak kalah besar. Keinginan mereka untuk diangkat sebagai PNS pun bertepuk sebelah tangan. Kementerian PAN dan reformasi birokrasi mengaku sulit untuk mengangkat guru honorer sebagai PNS karena adanya moratorium. Selain itu, pemerintah juga terikat oleh terbatasnya anggaran belanja.

Berdasarkan laporan *Educational Efficiency Index* yang dikutip www.tirto.id, Indonesia termasuk negara yang paling kurang mengapresiasi guru. Dari 30 negara yang termasuk dalam survey tersebut, gaji guru di Swiss merupakan yang tertinggi dengan nilai \$68.000 atau Rp 950 juta per tahun. Indonesia sendiri berada di urutan paling buncit dengan gaji \$2.830 atau Rp 39 juta per tahun. Gaji guru PNS ada dalam rentang Rp 1.486.500 sampai Rp 5.620.300 bergantung pada golongan kepegawaian. Sementara itu surat dari pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kepada Presiden RI, rata-rata penghasilan guru non-PNS adalah Rp 200.000. dari data tersebut dapat dilihat bahwa investasi pendidikan masih kurang optimal bagi guru-guru, terutama non-PNS.

Jika penggunaan anggaran pendidikan dapat dioptimalkan dan tepat sasaran, maka dapat meminimalisir ketimpangan guru PNS dan non-PNS, mengurangi jumlah rakyat yang tidak dapat mengenyam pendidikan, dan meningkatkan kreativitas pemuda Indonesia. Oleh karenanya, pemimpin daerah diharapkan lebih serius dengan memaksimalkan anggaran pendidikan. Supaya semua daerah dapat mengoptimalkan anggaran, maka pemerintah harus dapat melakukan audit eksternal untuk memeriksa kebenaran penggunaan anggaran. Mengingat investasi pendidikan ini sangat penting

dan mendesak karena persaingan di era globalisasi ini yang semakin berat.

Secara Global seperti yang dikutip www.kompasiana.com, menurut laporan peringkat *Human Development Index (HDI)* sebagai angka untuk mengukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh UNDP PBB pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat ke 113 pada tahun 2015. Sebelumnya pada tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 110. Peringkat tersebut tergolong rendah karena peringkat tersebut dari 169 negara. Dinamika pada komponen-komponen HDI Indonesia antara tahun 2014-2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jika dilihat dari persentase Produk Domestik Bruto (PDB) atau keseimbangan kemampuan berbelanja per kapita, pengeluaran untuk bidang pendidikan turun dari 3,6% menjadi 3,3%, jumlah murid yang dikeluarkan dari sekolah (*drop out*) naik dari 11% menjadi 18,1%, dan kesenjangan pendidikan tetap sebesar 20,8%.

Laporan HDI untuk tahun 2015 yang telah dipaparkan tersebut memberikan informasi bahwa kondisi indeks pengembangan manusia Indonesia pada masa-masa awal pemerintahan Joko Widodo masih memerlukan kajian-kajian secara mendalam oleh para pakar dan pemerintah untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada serta merancang berbagai strategi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Fakta-fakta serupa

Beberapa fakta serupa dapat dicermati di beberapa negara. Contohnya di negara Vietnam, investasi publik dalam pendidikan dan pelatihan menempati proporsi penting dalam anggaran publik Vietnam. Anggaran tersebut sekitar 20%, setara dengan 5% GDP (*Gross Domestic Product*). Dalam penelitian disampaikan bahwa investasi

publik dalam pendidikan dan pelatihan memiliki banyak manfaat dan dampak positif terhadap ekonomi dan masyarakat dengan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan produktivitas nasional, kualifikasi masyarakat, dan tingkat intelektual serta mengurangi pengangguran, kemiskinan di suatu negara. Penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi yang relevan bagi pemerintah Vietnam untuk meningkatkan kinerja investasi publik dalam pendidikan dan pelatihan dengan memberikan kontribusi untuk memastikan struktur investasi yang sesuai serta menjunjung tinggi peran penting pendidikan dan pelatihan kepada perkembangan ekonomi dan masyarakat.(Hien, 2018).

Contoh lain adalah negara Malaysia. Menurut berita online Malaysia tahun 2016, adanya komitmen berkelanjutan Malaysia untuk pendidikan menurut bank dunia yang terbukti dari jumlah yang diinvestasikan di sektor pendidikan setiap tahun, biasanya setidaknya 20% dari anggaran tahunan untuk semua tingkat pembelajaran dan hasilnya adalah peningkatan berkelanjutan dalam akses ke pendidikan, dengan mendekati pendaftaran universal di tingkat dasar dan menengah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diberikan, maka kesimpulan dari artikel ini adalah diperlukannya strategi untuk mengoptimalkan anggaran yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan tiga syarat pencapaian terhadap anggaran pendidikan, yaitu: (1) memastikan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun pada saat anggaran pendidikan 20 persen terpenuhi; (2) harus ada jaminan bagi tunjangan guru dan peningkatan SDM; (3) harus ada jaminan perbaikan sarana pendidikan.

Selain itu investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Melalui fungsi-fungsi pendidikan di atas yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan maka negeri ini dapat disatukan kembali. Dari paparan di atas tampak bahwa pendidikan adalah wahana yang amat penting dan strategis untuk perkembangan ekonomi dan integrasi bangsa. Singkatnya pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama.

Saran

Ada pun saran yang perlu secara konkret dilakukan adalah:

1. Perlu diadakannya pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program investasi pendidikan yang disertai bukti dan laporan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Perlu adanya transparansi anggaran yang dilakukan dari penggunaan 20% APBN atau APBD yang telah diinvestasikan untuk pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi. 1999. *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Becker, Gary S. 1993. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. 3rd. Chicago: The University of Chicago Press.
- Cheng, Yin Cheong. 1996. *School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism for*

- Development*. Washington D.C: The Palmer Press.
- Cohn, Elchanan. 1979. *The Economics Of Education: An Introduction*. Massachussetts: Ballinger Publishing Company.
- Hien, Phung Van. 2018. Public Investment in Education and Training in Vietnam. *International Education Studies*. 11.7: 106-115.
- McMahon, Walter W. and Geske, Terry G. 1982. *Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity*. USA: University of Illionis, ,
- <https://oxfordbusinessgroup.com/country/malaysia/education> (diakses 02 Mei 2019)
- <https://tirto.id/menunggu-upah-layak-untuk-guru-honorar-bRcJ> (diakses 24 April 2019)
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/16/ozi102382-sri-mulyani-tekan-pentingnya-investasi-pendidikan> (diakses 24 April 2019)
- <https://www.kompasiana.com/ronaldhutasuhut/58d20bc4519773ed0964b01c/laporan-peringkat-hdi-indonesia-terbaru-2016#> (diakses 24 April 2019)